

Judul : Maksimalkan peleyanan haji, Kemenhaj tambah petugas haji dari unsur TNI & Polri
Tanggal : Selasa, 20 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Maksimalkan Pelayanan Haji Kemenhaj Tambah Petugas Haji Dari Unsur TNI & Polri

Kementerian Haji dan Umrah terus melakukan langkah konkret untuk memastikan perlindungan dan pelayanan jemaah haji 2026 berjalan maksimal.

Salah satunya memperkuat barisan petugas haji dengan menambah personel dari unsur TNI dan Polri. Langkah Kemenhaj ini pun menjadi perbincangan.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, pada penyelenggaraan haji di tahun-tahun sebelumnya,

petugas haji yang berasal dari anggota TNI/Polri memiliki standar kedisiplinan dan dedikasi pelayanan yang sangat dibutuhkan di lapangan.

"Menambah personel petugas haji dari TNI dan Polri adalah hasil evaluasi tahun ke tahun," ujar Dahnil, kepada *Rakyat Merdeka*, Senin (19/1/2026).

Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan memastikan, adanya penambahan

personel petugas haji dari unsur TNI dan Polri untuk musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Gus Irfan mengungkapkan, langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Tahun kemarin petugas dari TNI dan Polri ada 70 sekian, hari ini kita tambah menjadi 170 sekian," kata Gus Irfan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Penambahan ini, menurut Gus Irfan, bertujuan untuk memastikan jemaah mendapatkan pelayanan ter-

baik dan perlindungan maksimal selama di Tanah Suci. Selain TNI-Polri, Gus Irfan juga memastikan adanya penambahan petugas dari tenaga kesehatan (nakes). Namun, dia tidak tahu persis berapa jumlahnya.

"Tenaga kesehatan ditambah. Angkanya belum tahu persis saya," tutur Gus Irfan.

Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR Dini Rahmania menyambut baik penambahan kuota petugas haji dari unsur TNI dan Polri. Namun, dia meminta penambahan tersebut harus

sesuai aturan yang berlaku.

"Agar tidak tumpang tindih dengan tugas pelayanan haji, serta tidak mengurangi kuota petugas haji yang telah diatur dalam regulasi," ujar Dini Rahmania kepada *Rakyat Merdeka*, Senin (19/1/2026).

Untuk mengetahui penjelasan Dahnil Anzar Simanjuntak dan pandangan Dini Rahmania mengenai penambahan jumlah anggota TNI/Polri dalam petugas haji 2026, berikut wawancaranya.

DAHNIL ANZAR SIMANJUNTAK,
Wakil Menteri Haji Dan Umrah

TNI Dan Polri Miliki Dedikasi & Disiplin



“
Ini demi pelayanan terbaik terhadap jemaah. Kami butuh petugas-petugas yang prima dan mampu memberikan pelayanan prima terhadap jemaah.”

Benarkah ada rencana penambahan kuota petugas haji dari unsur TNI/Polri untuk penyelenggaraan haji tahun 2026 ini?

Kami fokus pada perlindungan dan pelayanan jemaah. Menambah personel petugas haji dari unsur TNI dan Polri adalah hasil evaluasi dari tahun ke tahun bahwa personel TNI/Polri memiliki dedikasi pelayanan yang baik dan melayani penuh kedisiplinan. Kami butuh petugas-petugas haji yang demikian.

Apa pertimbangan utama Kementerian sehingga merasa perlu melibatkan lebih banyak aparat berseragam dalam melayani jemaah?

Ini demi pelayanan terbaik terhadap jemaah. Kami butuh petugas-petugas yang prima dan mampu memberikan pelayanan prima terhadap jemaah. Bahkan saat ini, pelatihan atau diklat Petugas Haji juga mengadaptasi disiplin dan kekompakan khas TNI/Polri untuk

diterapkan oleh seluruh petugas.

Berarti saat ini seluruh petugas sedang menjalani pelatihan intensif. Apakah personel TNI/Polri ini juga sudah bergabung di sana?

Evetul. Semua petugas PPH Arab Saudi ikut diklat saat ini. Sebanyak 1.600 orang dari TNI/Polri yang sudah dinyatakan lulus seleksi.

Khusus untuk kuota TNI/Polri yang diterima dan ikut diklat di Asrama Haji Pondok Gede, apakah jumlahnya meningkat signifikan dari tahun lalu? Iya, kuotanya kami tambah. Mereka semua ikut seleksi ketat setelah diusut dari kesesuaiannya masing-masing untuk memastikan hanya yang terbaik yang berangkat.

Bisa dirincikan berapa angka kenaikan untuk musim haji kali ini? Tahun lalu kuotanya hanya 80

orang. Saat ini kuota TNI/Polri totalnya kami tambah menjadi 185 orang. Jadi peningkatannya cukup besar untuk memperkuat lini pelayanan kami.

Pada penyelenggaraan sebelumnya, personel TNI/Polri identik dengan layanan Perlindungan Jemaah (Linjam). Apakah tahun ini masih sama atau ada pergeseran tugas?

TNI/Polri tidak semuanya ditempatkan di Linjam. Ada juga yang nantinya kami tugaskan di pelayanan lansia dan pelayanan kesehatan.

Artinya personel dari instansi keamanan ini juga akan mengisi layanan lainnya ya?

Benar. Misalnya personel TNI/Polri yang berlatar belakang dokter maupun tenaga medis, mereka akan dioptimalkan di sana. Jadi kekuatannya merata di berbagai lini layanan, bukan hanya keamanan. ■ *NRM*

DINI RAHMANIA,
Anggota Komisi VIII DPR

Rekrutmennya Harus Transparan & Kompeten



“
Penambahan jumlah petugas dari unsur TNI dan Polri tetap harus ditempatkan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Kuota petugas haji dari unsur anggota TNI dan Polri pada musim haji 2026 akan ditambah menjadi 185 orang, naik dari sebelumnya yang hanya 80 orang. Bagaimana Anda melihat penambahan kuota petugas haji dari unsur TNI dan Polri ini?

Saya menyambut baik langkah Kementerian Haji dan Umrah yang menyiapkan tambahan personel dari unsur TNI dan Polri untuk memperkuat perlindungan dan keamanan jemaah layanan di Tanah Suci yang sangat dinamis, penguatan aspek perlindungan jemaah memang menjadi kebutuhan.

Walaupun Dahnil Anzar Simanjuntak menilai, petugas haji dari unsur TNI/Polri selama ini memiliki dedikasi yang lebih baik dalam bertugas melayani jemaah. Apakah hal ini bisa menjadi alasan untuk menambah kuota petugas haji dari unsur TNI/Polri?

Berdasarkan pengawasan Komisi VIII DPR, petugas dari unsur TNI dan Polri selama ini menunjukkan kedisiplinan dan kesiapan yang baik di lapangan, terutama dalam situasi padat dan darurat.

Jadi memang tepat keputusan ini ya? Hal ini dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam memperkuat fungsi perlindungan jemaah.

Menurut Anda, apakah petugas dari unsur TNI dan Polri ini harus berfokus pada layanan perlindungan jemaah saja atau bisa ditempatkan pada layanan jemaah lainnya, seperti layanan lansia?

Penambahan jumlah petugas dari unsur TNI dan Polri tetap harus ditempatkan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maksudnya bagaimana?

Harus sesuai aturan agar tidak tumpang tindih dengan tugas pelayanan haji serta tidak mengurangi kuota petugas haji yang telah diatur dalam regulasi.

Untuk penempatan anggota TNI dan Polri, baiknya bagaimana?

Terkait penempatan di lapangan, unsur TNI dan Polri memang paling tepat difokuskan pada fungsi perlindungan jemaah. Meski demikian, mereka juga dapat dilibatkan dalam pendampingan jemaah lansia dan berisiko tinggi, sepanjang dibekali pelatihan khusus dan pendekatan yang humanis.

Lantas, adakah saran dari Anda untuk Kemenhaj dalam proses perekrutan petugas haji yang saat ini sedang dilakukan pendidikan?

Ke depan, saya mendorong Kementerian Haji dan Umrah agar proses rekrutmen dan pendidikan petugas haji dilakukan secara transparan dan berbasis kompetensi. ■ *NRM*